



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	✓	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	✓	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	-------------------	-------------------	------	----------	-----------------	---------	----------------------	-----------------

Temuan BPK Harus Jadi Perhatian Zainal Mus

<p>BANGKEP - Bupati Banggai Kepulauan H Zainal Mus diingatkan agar serius dalam menjalankan roda pemerintahan Bangkep. Temuan yang disampaikan BPK merupakan bukti bahwa saat masa transisi, terdapat berbagai kasus. Aktivis Anti Korupsi Bangkep, Frits Jaya menyampaikan, sebagaimana temuan</p>	<p>BPK yang diekspos, terdapat beberapa temuan yang mesti diselesaikan yaitu pungutan di dinas kesehatan, serta pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan jalan pada tahun anggaran 2015 lalu. "Itu yang mesti diselesaikan segera. Dan bupati harus menggaris-bawahi dua item itu," tandas Fritz, Rabu</p>	<p>(28/6). Mencermati temuan atas kelebihan pembayaran seharusnya tidak terjadi jika pengawas di lapangan jujur dalam mengawasi pekerjaan kontraktor. "Di Bangkep sudah biasa. Pengawas selalu join dengan kontraktor. Jarang memberikan masukan dan selalu iya iya saja."</p>
--	--	--

<p>jelasan.</p> <p>Pengawas seharusnya memberikan catatan terkait dengan pekerjaan. Baik itu atas kekurangan volume atau pun jenis material yang digunakan. "Supaya kalau pemeriksaan sudah jelas ada catatan dari pengawas. Jadi tidak seperti sekarang terdapat selisih pembayaran yang begitu besar," katanya.</p> <p>Terkait dengan temuan itu, Bupati Zainal Mus menjelaskan saat ini dia</p>	<p>telah membentuk tim pengawas yang dipimpin oleh wakil Bupati Bangkep Rais Adam. "Tugas beliau mengawasi jalannya pekerjaan di Bangkep sebelum dibayarkan SPPnya," jelas Zainal.</p> <p>Ia mengakui banyak pekerjaan yang bermasalah tapi sudah selesai pencairan 100 persen. "Setelah dibentuk tim pengawas, Wakil Bupati akan bertanggung-jawab sebelum pekerjaan tersebut dibayarkan," ujar Zainal Mus. (bar)</p>
--	---